



KABUPATEN  
MALUKU TENGAH



*Laporan Penyelenggaraan*  
**PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO**

TRIWULAN I TAHUN 2026



**DPMPTSP**  
DIKAS PENANJANG MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
*Maluku Tengah*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini benar-benar didasarkan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilaksanakan, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi unit layanan guna peningkatan mutu pelayanan perizinan yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan masyarakat.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

Demikian laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak baik internal maupun eksternal di Kabupaten Maluku Tengah.

Masohi, Maret 2026

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**



**IRVAN RACHMAT, ST**

Pembina-IV/a

NIP. 19740529 200604 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Dasar Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
<b>BAB II REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</b> .....	<b>8</b>
2.1 Jumlah Perizinan Berusaha Dilihat Berdasarkan Sebaran Proyek Per Kecamatan .....	8
2.2 Jumlah Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) .....	9
2.3 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Perizinan .....	10
2.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan.....	11
2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI .....	11
2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko .....	20
2.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal .....	21
2.8 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Klasifikasi Usaha .....	22
2.9 Jumlah Perizinan Berusaha Non OSS .....	23
<b>BAB III REALISASI INVESTASI</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB IV KENDALA DAN SOLUSI</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>26</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Sebaran Proyek Per Kecamatan.....	8
Tabel 2.2 Jumlah Penertiban NIB Per Bulan.....	9
Tabel 2.3 Jumlah Perizinan Berusaha yang diterbitkan Berdasarkan Status Perizinan.....	10
Tabel 2.4 Jumlah Perizinan Berusaha yang diterbitkan Berdasarkan Jenis Perizinan.....	11
Tabel 2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI .....	12
Tabel 2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko .....	17
Tabel 2.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal .....	18
Tabel 2.8 Jumlah Perizinan Berusaha Klasifikasi Usaha .....	19
Tabel 2.9 Jumlah Perizinan Berusaha Non OSS .....	20
Tabel 3.1 Realisasi Investasi Kabupaten Maluku Tengah .....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Sebaran Perizinan Berdasarkan Proyek Per Kecamatan .....	9
Gambar 2.2 Grafik NIB Per Bulan .....	9
Gambar 2.3 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Perizinan.....	10
Gambar 2.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan.....	11
Gambar 2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI 5 Terbesar .....	17
Gambar 2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko .....	18
Gambar 2.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal .....	19
Gambar 2.8 Jumlah Perizinan Berusaha Klasifikasi Usaha .....	20
Gambar 2.9 Jumlah Perizinan Berusaha Non OSS .....	21
Gambar 3.1 Jumlah Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja (PMDN/PMA) .....	22

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*risk-based approach*/RBA). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi struktural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

OSS versi RBA memuat perizinan berusaha yang dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha sehingga memudahkan pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah untuk memiliki perizinan berusaha dengan mudah. Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran di sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan untuk usaha dengan tingkat risiko menengah maka perizinan berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, perizinan berusahanya adalah NIB dan Izin.

OSS-RBA wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (LKPBPB). Sistem OSS-RBA ini terpusat dan terintegrasi sehingga seluruh kegiatan usaha yang mencakup 16 sektor (Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, ESDM, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Transportasi, Kesehatan Obat dan Makanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Keagamaan, Pos Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik, Pertanahan dan Keamanan, dan Ketenagakerjaan) dapat melakukan permohonan izin nya melalui OSS-RBA. Pihak yang dapat melakukan permohonan perizinan berusaha pada OSS-RBA ini antara lain: pelaku usaha perseorangan, pelaku usaha badan usaha, pelaku usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah, maka pendelegasian wewenang perizinan di DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah meliputi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati Maluku Tengah berdasarkan asas tugas pembantuan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang tidak diatur dalam Sistem OSS-RBA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Maluku Tengah perlu adanya Laporan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai upaya penyediaan data perizinan, memberi informasi dan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Maluku dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal;
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
6. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Maluku Tengah.
7. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

#### **2. Tujuan**

Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## BAB II REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Rekapitulasi data perizinan berusaha berbasis risiko berisi data perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan. Data telah diolah dan disajikan dalam bentuk Tabel dan grafik yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori yang meliputi : Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Sebaran Proyek Per Kecamatan, Jumlah Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Perizinan, Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan, Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI, Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko, Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal, Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Jumlah Perizinan Berusaha Non OSS.

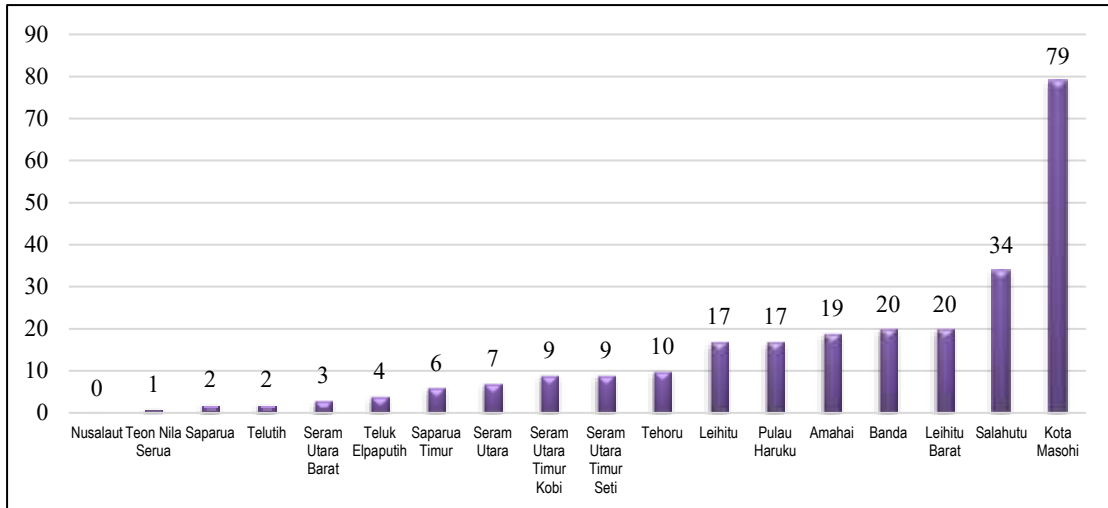
### 2.1. Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Sebaran Proyek Per Kecamatan

Pada Triwulan I Tahun 2026 Jumlah Perizinan Berusaha dilihat berdasarkan sebaran proyek per kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 259 proyek. Jumlah tersebut meliputi 18 wilayah kecamatan usaha yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah. Kecamatan Kota Masohi memiliki jumlah yang lebih tinggi dibanding dengan kecamatan lain yakni sebesar 79 (30,50%). Angka ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Masohi merupakan pusat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah, yang menyebabkan aktivitas penanaman modal tertinggi terpusat di wilayah ini.

**Tabel 2.1. Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Sebaran Proyek Per Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Proyek	Persentase
1	Nusalaut	0	0,00%
2	Teon Nila Serua	1	0,39%
3	Saparua	2	0,77%
4	Telutih	2	0,77%
5	Seram Utara Barat	3	1,16%
6	Teluk Elpaputih	4	1,54%
7	Saparua Timur	6	2,32%
8	Seram Utara	7	2,70%
9	Seram Utara Timur Kobi	9	3,47%
10	Seram Utara Timur Seti	9	3,47%
11	Tehoru	10	3,86%
12	Leihitu	17	6,56%
13	Pulau Haruku	17	6,56%
14	Amahai	19	7,34%
15	Banda	20	7,72%
16	Leihitu Barat	20	7,72%
17	Salahutu	34	13,13%
18	Kota Masohi	79	30,50%
<b>Total</b>		<b>259</b>	<b>100,00%</b>

Sumber Data : Dashboard OSS Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026



**Gambar 2.1 Sebaran Perizinan Berdasarkan Proyek Per Kecamatan**

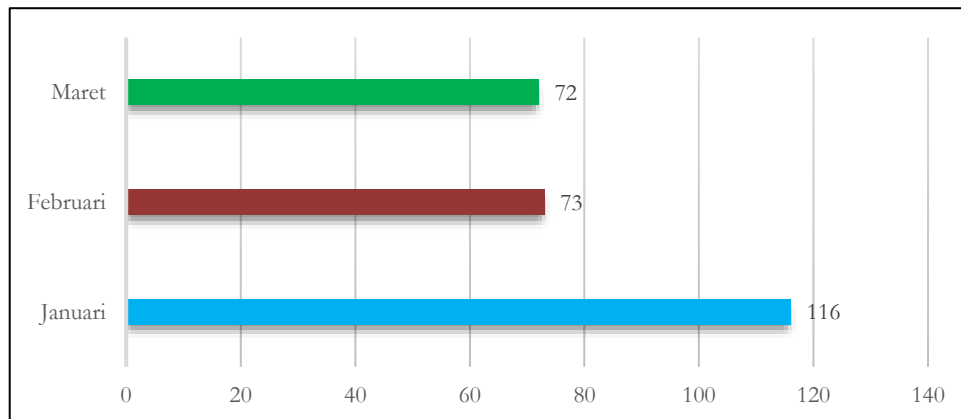
## 2.2. Jumlah Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada Triwulan I Tahun 2026 jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 261 NIB. Berdasarkan hasil penerbitan perizinan NIB per bulan diketahui bahwa periode bulan Februari menunjukkan jumlah penerbitan NIB yang lebih tinggi dibanding dengan bulan lain yakni sebesar 73 (27,97%).

**Tabel 2.2 Penerbitan NIB Per Bulan**

No.	Bulan	Jumlah	Persentase
1	Januari	116	44,44%
2	Februari	73	27,97%
3	Maret	72	27,59%
	<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100,00%</b>

Sumber Data : Dashboard OSS Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026



**Gambar 2.2 Grafik NIB Per Bulan**

### 2.3. Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Perizinan

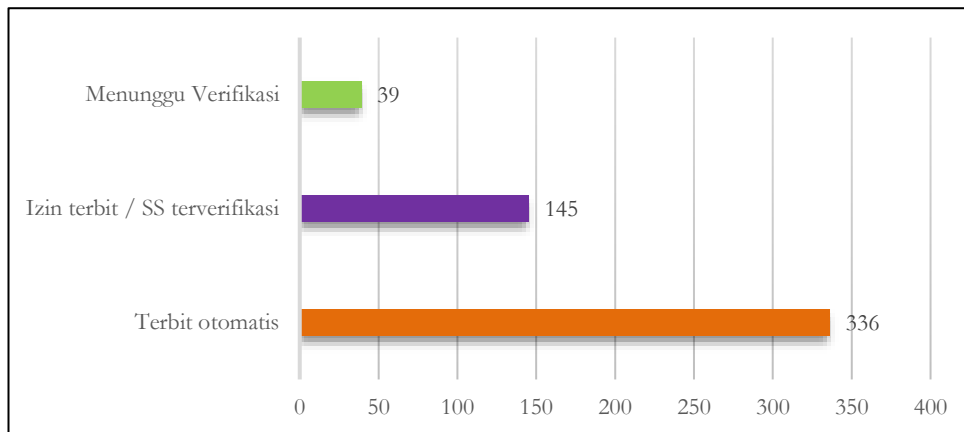
Jumlah Perizinan Berusaha sebagaimana pada Tabel 2.3 menunjukkan jumlah keseluruhan perizinan berusaha yang diterbitkan berdasarkan status perizinan pada Triwulan I Tahun 2026 meliputi perizinan yang terbit secara otomatis, izin terbit /sertifikat standar terverifikasi dan izin yang menunggu verifikasi.

**Tabel 2.3 Jumlah Perizinan Berusaha yang diterbitkan Berdasarkan Status Perizinan**

No.	Status Perizinan	Jumlah	Persentase
1	Terbit Otomatis	336	64,62%
2	Izin terbit / Sertifikat Standar Terverifikasi	145	27,88%
3	Menunggu Verifikasi	39	7,50%
	<b>Total</b>	<b>520</b>	<b>100,00%</b>

Sumber Data : Dashboard OSS Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026

Dari jumlah yang ada menunjukkan bahwa status perizinan yang terbit secara otomatis lebih tinggi yakni sebesar 336 (64,62%), diikuti oleh Izin Terbit/Sertifikat Standar Terverifikasi sebesar 145 (27,88%) dan Menunggu Verifikasi sebesar 39 (7,50%).



**Gambar 2.3 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Perizinan**

Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha (64,62%) mengajukan perizinan untuk usaha dengan tingkat risiko rendah dimana dalam proses perizinan NIB dapat langsung terbit tanpa verifikasi lanjutan. Untuk perizinan yang terverifikasi (27,88%) menunjukkan bahwa masih adanya aktivitas usaha skala menengah atau tinggi yang memerlukan Sertifikat Standar (SS) atau Izin Berusaha yang terverifikasi secara mendalam oleh Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan untuk status menunggu (7,50%) menunjukkan kondisi dimana usaha dengan risiko menengah-tinggi yang memerlukan pemenuhan dokumen tambahan atau Sertifikat Standar.

#### 2.4. Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan

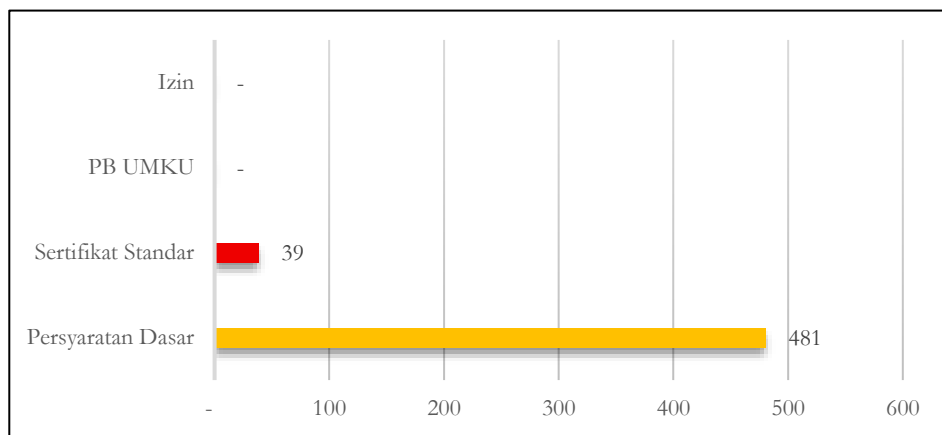
Jumlah Perizinan Berusaha sebagaimana pada Tabel 2.4 menunjukkan jumlah keseluruhan perizinan berusaha yang diterbitkan berdasarkan jenis perizinan pada Triwulan I Tahun 2026 meliputi Persyaratan Dasar, Sertifikat Standar, PB UMKU dan Izin.

**Tabel 2.4 Jumlah Perizinan Berusaha yang diterbitkan Berdasarkan Jenis Perizinan**

No.	Perizinan Berdasarkan Jenis	Jumlah	Persentase
1	Persyaratan Dasar	481	92,50%
2	Sertifikat Standar	39	7,50%
3	PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	-	0,00%
4	Izin	-	0,00%
<b>Total</b>		<b>520</b>	<b>100,00%</b>

Sumber Data : Dashboard OSS Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026

Jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan berdasarkan jenis perizinan adalah sebesar 520 izin. Dari total jumlah yang ada jenis perizinan persyaratan dasar memiliki jumlah paling tinggi yaitu sebesar 481 (92,50%), diikuti oleh sertifikat standar sebesar 39 (7,50%). Sedangkan untuk PB UMKU dan Izin tidak ada.



**Gambar 2.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Jenis Perizinan**

Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar usaha (92,50%) berada pada tahap pemenuhan persyaratan dasar sebelum masuk ke tahap operasional yang memerlukan sertifikat standar atau izin lebih lanjut. Ketiadaan PB UMKU dan Izin (0) menunjukkan bahwa belum ada perizinan yang memerlukan verifikasi lanjutan untuk kegiatan operasional/komersial pada tahap perizinan berisiko tinggi.

## 2.5. Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI

Jumlah Perizinan Berusaha sebagaimana pada Tabel 2.5 menunjukkan jumlah keseluruhan perizinan berusaha berdasarkan nama KBLI pada Triwulan I Tahun 2026 yang berlaku pada aplikasi OSS-RBA.

**Tabel 2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI**

Kbli	Judul Kbli	Jumlah	Persentase
56102	Rumah/Warung Makan	2	0,77%
56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	1	0,38%
56101	Restoran	1	0,38%
33141	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	1	0,38%
45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	1	0,38%
35302	Produksi Es	2	0,77%
63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	1	0,38%
1270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	1	0,38%
1199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl	1	0,38%
1289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	3	1,15%
1131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	3	1,15%
1283	Pertanian Cabai	1	0,38%
1220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	1	0,38%
1230	Pertanian Buah Jeruk	1	0,38%
1282	Perkebunan Cengkeh	2	0,77%
52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	1	0,38%
47762	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	1	0,38%
45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	2	0,77%
45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	1	0,38%
47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	1	0,38%
47213	Perdagangan Eceran Sayuran	4	1,54%
47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	1	0,38%
47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	2	0,77%
47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	1	0,38%
47599	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	1	0,38%
47737	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	1	0,38%
47711	Perdagangan Eceran Pakaian	7	2,69%
47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	1	0,38%

Kbli	Judul Kbli	Jumlah	Persentase
47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	1	0,38%
47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	1	0,38%
47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	3	1,15%
47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	1	0,38%
47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	1	0,38%
47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	1	0,38%
47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	1	0,38%
47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	4	1,54%
47591	Perdagangan Eceran Furnitur	1	0,38%
47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	1	0,38%
47999	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL	1	0,38%
47212	Perdagangan Eceran Buah-buahan	2	0,77%
47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	2	0,77%
47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	3	1,15%
47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	39	15,00%
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	5	1,92%
47773	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	1	0,38%
47529	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	1	0,38%
47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	10	3,85%
47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	1	0,38%
47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	1	0,38%
46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	1	0,38%
46412	Perdagangan Besar Pakaian	1	0,38%
46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	2	0,77%
46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	1	0,38%
46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	2	0,77%
46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	1	0,38%

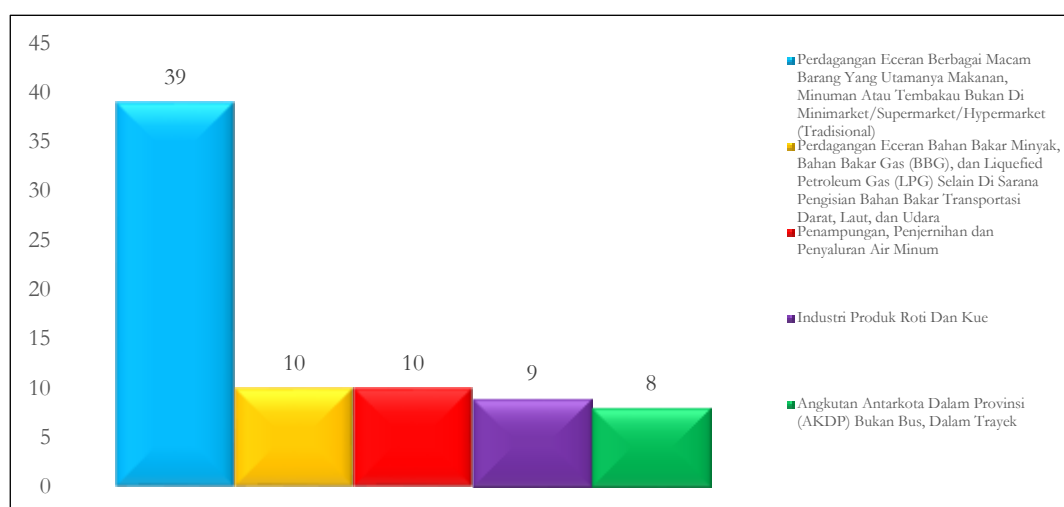
Kbli	Judul Kbli	Jumlah	Persentase
47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	1	0,23%
47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	3	0,70%
47774	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	1	0,23%
47796	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	1	0,23%
47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	2	0,47%
46313	Perdagangan Besar Sayuran	2	0,47%
46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	1	0,23%
46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	1	0,23%
46311	Perdagangan Besar Beras	1	0,23%
46696	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	1	0,23%
60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	1	0,23%
60101	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	1	0,23%
56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	2	0,47%
56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	1	0,23%
55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	1	0,23%
14120	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	1	0,23%
58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	1	0,23%
45202	Pencucian Dan Salon Mobil	2	0,47%
1468	Pembibitan Ayam Ras	2	0,47%
1463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	1	0,23%
66153	Pedagang Fisik Komoditi	1	0,23%
42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	4	0,93%
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	1	0,23%
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	1	0,23%
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	1	0,23%
41011	Konstruksi Gedung Hunian	1	0,23%
85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	1	0,23%
56103	Kedai Makanan	12	2,80%
79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	1	0,23%
61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	1	0,23%
79911	Jasa Informasi Pariwisata	1	0,23%
79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	1	0,23%
25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	1	0,23%

Kbli	Judul Kbli	Jumlah	Persentase
46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	1	0,38%
56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	2	0,77%
55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	1	0,38%
14120	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	1	0,38%
72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	1	0,38%
45202	Pencucian Dan Salon Mobil	1	0,38%
36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	10	3,85%
1411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	1	0,38%
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	4	1,54%
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	1	0,38%
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	1	0,38%
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	1	0,38%
41013	Konstruksi Gedung Industri	1	0,38%
42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	1	0,38%
56304	Kedai Minuman	2	0,77%
56103	Kedai Makanan	2	0,77%
61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	1	0,38%
56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	3	1,15%
43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	1	0,38%
43224	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	1	0,38%
43291	Instalasi Mekanikal	1	0,38%
43211	Instalasi Listrik	1	0,38%
43213	Instalasi Elektronika	1	0,38%
10710	Industri Produk Roti Dan Kue	9	3,46%
10799	Industri Produk Makanan Lainnya	6	2,31%
10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	3	1,15%
10219	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	1	0,38%
10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	2	0,77%
10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	2	0,77%
10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)	1	0,38%
10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	1	0,38%
10313	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	2	0,77%
10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	3	1,15%
10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	1	0,38%

Kbli	Judul Kbli	Jumlah	Persentase
20294	Industri Minyak Atsiri	1	0,38%
11040	Industri Minuman Ringan	3	1,15%
11090	Industri Minuman Lainnya	2	0,77%
10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	1	0,38%
10792	Industri Kue Basah	2	0,77%
10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	1	0,38%
31001	Industri Furnitur Dari Kayu	2	0,77%
10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	1	0,38%
23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	2	0,77%
11052	Industri Air Minum Isi Ulang	2	0,77%
49426	Angkutan Sewa Khusus	3	1,15%
49422	Angkutan Sewa	2	0,77%
49412	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	8	3,08%
61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	1	0,38%
77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	3	1,15%
77311	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	1	0,38%
77210	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga	2	0,77%
77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	2	0,77%
86901	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	1	0,38%
70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	3	1,15%
81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	5	1,92%
96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	5	1,92%
74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	1	0,38%
<b>Total</b>		<b>260</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Dashboard OSS Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026

Jumlah total jumlah penerbitan izin berdasarkan KBLI yang terbit pada Triwulan I Tahun 2026 terdapat sebanyak 260 izin. Dari keseluruhan KBLI tersebut terdapat kegiatan usaha yang diurutkan dalam 5 besar antara lain meliputi Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Minuman, Minuman atau Tembakau Bukan Di Minimarket / Supermarket / Hypermarket (Tradisional) (47112) sebanyak 39 izin, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara (47302) sebanyak 10 izin, Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum (36001) sebanyak 10 izin, Industri Produk Roti Dan Kue (10710) sebanyak 9 izin, dan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek (49412) sebanyak 8 izin.



**Gambar 2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI 5 Terbesar**

- KBLI 47112 - Perdagangan Eceran (Tradisional) (39 Izin): Mendominasi secara signifikan. Ini menunjukkan sektor UMKM/warung kelontong tradisional masih menjadi tulang punggung ekonomi mikro dan kebutuhan sehari-hari warga.
- KBLI 47302 - Agen BBM/LPG (Non-SPBU) (10 Izin): Menunjukkan tingginya distribusi bahan bakar/gas skala kecil hingga menengah ke pelosok atau konsumen langsung.
- KBLI 36001 - Penampungan/Penyaluran Air Minum (10 Izin): Mengindikasikan kebutuhan tinggi akan akses air bersih, baik usaha depot air minum atau layanan pengelolaan air skala kecil/menengah.
- KBLI 10710 - Industri Roti dan Kue (9 Izin): Menunjukkan pertumbuhan industri rumahan atau UMKM kuliner makanan olahan.
- KBLI 49412 - AKDP Bukan Bus/Trayek (8 Izin): Menandakan aktivitas mobilitas antarwilayah yang tinggi dengan moda transportasi kecil atau barang, bukan bus umum besar.

## 2.6. Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko

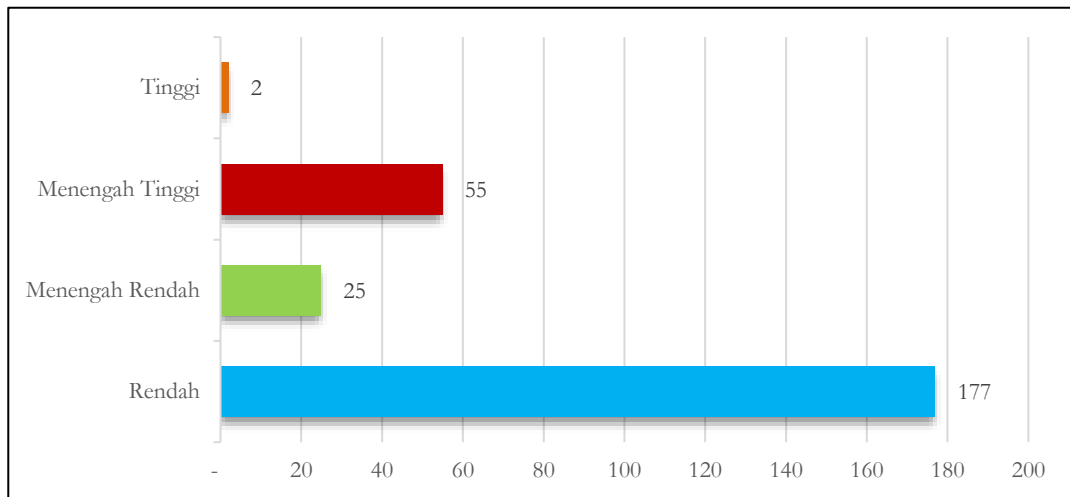
Jumlah Perizinan Berusaha sebagaimana pada Tabel 2.6 menunjukkan jumlah keseluruhan perizinan berusaha yang diterbitkan berdasarkan tingkat risiko pada Triwulan I Tahun 2026 meliputi perizinan risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi.

**Tabel 2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko**

No.	Perizinan Berdasarkan Tingkat Risiko	Jumlah	Persentase
1	Rendah	177	68,34%
2	Menengah Rendah	25	9,65%
3	Menengah Tinggi	55	21,24%
4	Tinggi	2	0,77%
	<b>Total</b>	<b>259</b>	<b>100,00%</b>

Sumber Data : Dashboard OSS Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026

Jumlah total perizinan berusaha yang diterbitkan berdasarkan tingkat risiko menunjukkan adalah sebanyak 259 izin. Dari total jumlah yang ada perizinan dengan tingkat risiko rendah memiliki jumlah yang tinggi yakni sebesar 177 izin (68,34%), diikuti oleh risiko menengah tinggi sebesar 55 izin (21,24%), risiko menengah rendah sebesar 25 izin (9,65%), dan risiko tinggi sebesar 2 izin (0,77%).



**Gambar 2. 6 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko**

Kategori Risiko Rendah memegang porsi tinggi sebesar (68,34%), hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi yang baru tumbuh di periode ini adalah sektor UMKM atau jenis usaha yang memiliki risiko lingkungan dan sosial yang rendah. Secara administratif, ini menunjukkan efisiensi karena usaha risiko rendah biasanya hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas utama. Untuk kategori Risiko Menengah Tinggi (21,24%) jauh lebih besar dibandingkan Risiko Menengah Rendah (9,65%). Hal ini menunjukkan bahwa

investasi yang masuk pada triwulan ini cenderung memiliki kompleksitas teknis yang lebih berat atau memerlukan standar sertifikasi yang lebih spesifik, meskipun volume usahanya bukan termasuk kategori risiko tertinggi. Sedangkan untuk kategori Risiko Tinggi hanya terdapat 2 izin (0,77%). Hal ini wajar karena kategori ini biasanya melibatkan industri skala besar dengan dampak lingkungan yang signifikan. Proses perizinan risiko tinggi memerlukan analisis mendalam (AMDAL) dan waktu pemenuhan komitmen yang lebih lama, sehingga frekuensi kemunculannya per triwulan cenderung kecil namun memiliki nilai investasi yang biasanya sangat besar.

### 2.7. Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Status Penanaman Modal

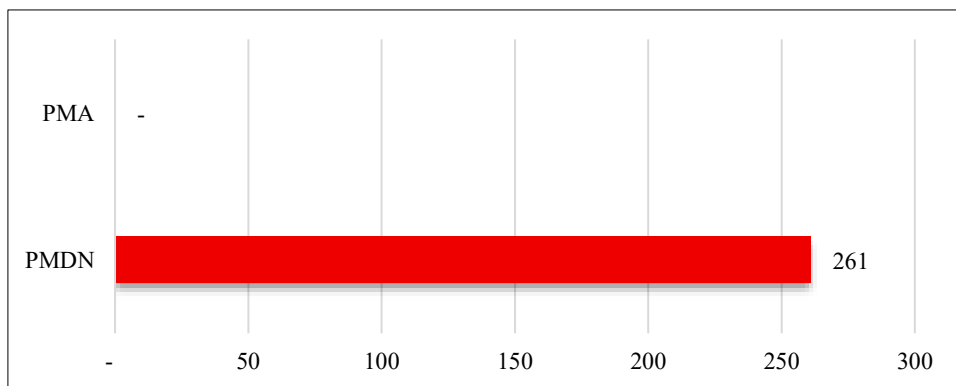
Jumlah perizinan berusaha berdasarkan status penanaman modal sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.7 menggambarkan jumlah perizinan berdasarkan status penanaman modal yang meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

**Tabel 2.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal**

No.	Status Penanaman Modal	Jumlah	Persentase
1	PMDN	261	100,00%
2	PMA	-	0,00%
	<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100,00%</b>

Sumber Data : Dashboard OSS Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026

Jumlah total perizinan berusaha yang diterbitkan berdasarkan tingkat status penanaman modal adalah sebanyak 261 izin. Dari jumlah yang ada menunjukkan bahwa PMDN memiliki jumlah yang tinggi yakni sebesar 261 (100%). Sedangkan untuk PMA tidak ada izin yang diterbitkan.



**Gambar 2.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal**

Angka 100% PMDN menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, pembangunan usaha, dan investasi pada periode tersebut sepenuhnya digerakkan oleh modal domestik. Hal ini positif karena menunjukkan tingginya kepercayaan pengusaha lokal terhadap iklim usaha setempat dan komitmen untuk membangun ekonomi dalam negeri. Sedangkan tidak adanya PMA mengindikasikan bahwa tidak ada proyek baru dari investor luar negeri atau perusahaan patungan yang berbadan hukum Indonesia yang menerbitkan perizinan pada periode ini.

### 2.8. Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Klasifikasi Usaha

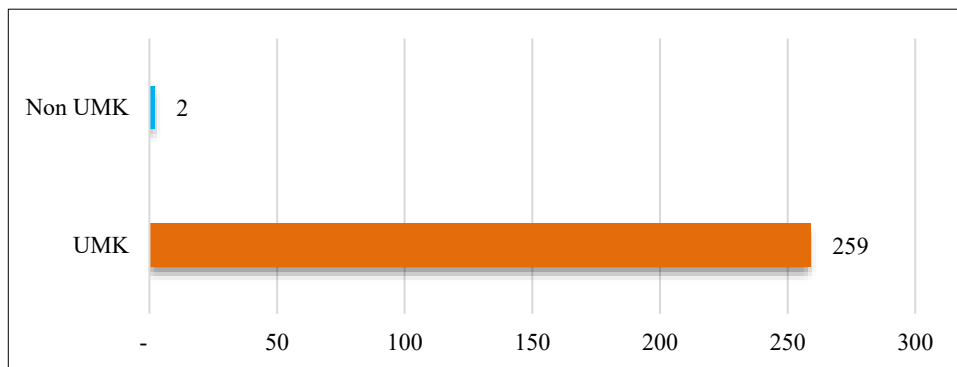
Jumlah perizinan berusaha berdasarkan klasifikasi usaha sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.8 menggambarkan jumlah perizinan berdasarkan klasifikasi usaha yang meliputi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).

**Tabel 2.8 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Klasifikasi Usaha**

No.	Jenis Perizinan	Jumlah	Persentase
1	UMK	259	99,23%
2	Non UMK	2	0,77%
<b>Total</b>		<b>261</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Realisasi Perizinan Non OSS Triwulan I Tahun 2026

Jumlah total perizinan berusaha yang diterbitkan berdasarkan klasifikasi usaha adalah sebesar 261 izin. Dari jumlah yang ada menunjukkan bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lebih banyak yang terbit yakni sebanyak 259 (99,23%). Sedangkan untuk Non UMK sebanyak 2 (0,77%).



**Gambar 2.8 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Klasifikasi Usaha**

Total UMK 261 izin (99,23%) mencakup hampir seluruh perizinan yang diterbitkan. Jumlah ini menunjukkan keberhasilan kebijakan kemudahan berusaha di tingkat mikro/kecil, namun juga menunjukkan ketergantungan pada sektor informal yang perlu didorong menuju kemandirian ekonomi yang lebih tinggi.

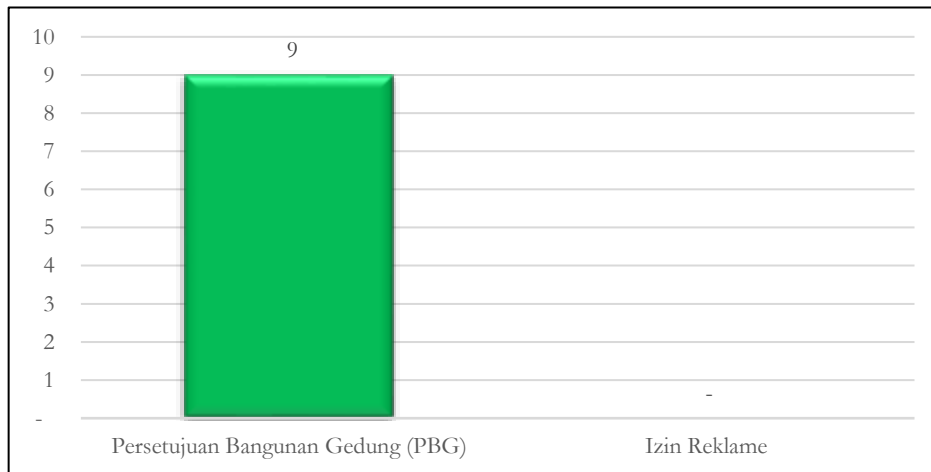
### 2.9. Jumlah Perizinan Berusaha Non OSS

Data perizinan berusaha Non OSS Triwulan I Tahun 2026 yang diterbitkan sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.9 menggambarkan bahwa untuk izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah sebanyak 9 (100%). Sedangkan untuk izin reklame tidak ada. Lihat Tabel 2.8.

**Tabel 2.9 Jumlah Perizinan Berusaha Non OSS**

No.	Jenis Perizinan	Jumlah	Persentase
1	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	9	100,00
2	Izin Reklame	-	0,00
<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : Realisasi Perizinan Non OSS Triwulan I Tahun 2026



**Gambar 2.9 Jumlah Perizinan Berusaha Non OSS**

### BAB III REALISASI INVESTASI

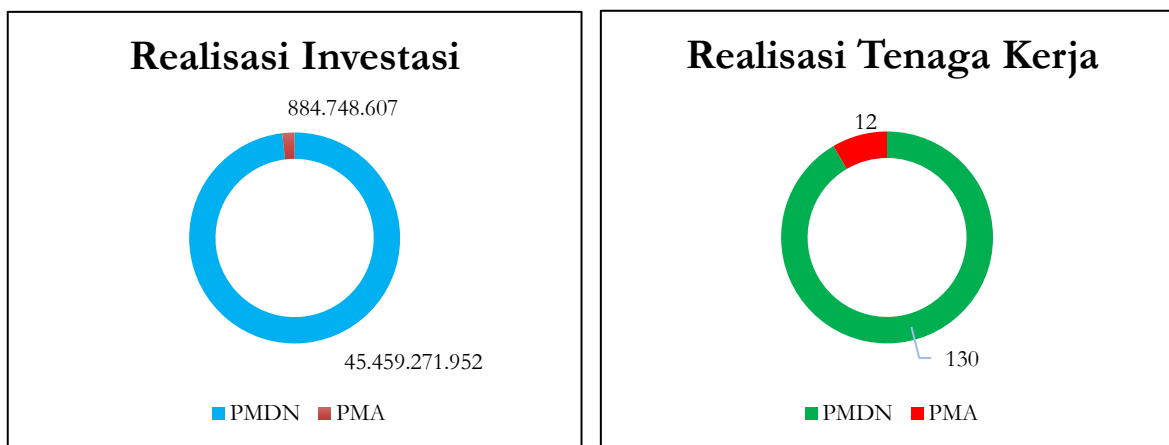
Realisasi investasi Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp. 46.344.020.559, setara 6,39% dari target Tahun 2026 yakni sebesar Rp. 725.460.000.000. Total realisasi investasi ini menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 142 orang.

Pencapaian ini di dominasi oleh investasi di sektor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah Realisasi Investasi PMDN Triwulan I adalah sebesar Rp. 45.459.271.952 (98,09%), dengan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 130 orang (91,55%). Sedangkan untuk Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I adalah sebesar Rp. 884.748.607 (1,91%), dengan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 12 orang (8,45%). Data realisasi investasi Kabupaten Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Realisasi Investasi Kabupaten Maluku Tengah**

No.	INVESTOR	REALISASI INVESTASI		REALISASI TENAGA KERJA	
		(Rp.)	%	Orang	%
1	PMDN	45.459.271.952	98,09%	130	91,55%
2	PMA	884.748.607	1,91%	12	8,45%
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>46.344.020.559</b>	<b>100%</b>	<b>142</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I Tahun 2026



**Gambar 2.9 Jumlah Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja**

## **BAB IV**

### **KENDALA DAN SOLUSI**

Dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah terdapat beberapa kendala terkait pelayanan antara lain :

1. Kendala regulasi di daerah,
2. Kendala birokrasi.
3. Kendala teknis dan implementasi OSS.
4. Kendala terkait pemenuhan persyaratan dasar perizinan.

Solusi yang harus dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Tengah antara lain:

1. Menyinkronkan regulasi daerah dengan regulasi di pusat.
2. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, memastikan rekrutmen berbasis merit, dan mendorong profesionalisme ASN di daerah.
3. Meningkatkan koneksi jaringan internet yang stabil, menyediakan sarana prasarana/fasilitas pendukung layanan yang memadai, menyediakan panduan resmi terkait penggunaan OSS dan meningkatkan pemahaman pengguna terkait sistem OSS melalui kegiatan sosialisasi dan implementasi OSS secara langsung kepada pelaku usaha.
4. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang ingin melakukan pemenuhan persyaratan dasar perizinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Maluku Tengah Triwulan I Tahun 2026 ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi bahan informasi untuk berbagai pihak. Terima kasih.



**DMPTSP**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

*Maluku Tengah*